



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

JAZ

JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ



JAZ	VOLUME 6	NOMOR 2	BENGKULU, DESEMBER 2023	ISSN: 2620-8555
-----	----------	---------	-------------------------	-----------------

Penanggung Jawab	: Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Penanggung Jawab Redaksi	: Helmi Herawati, S.E., M.Si
Pimpinan Redaksi	: Helvoni Mahrina, SE., MM
Dewan Penyunting	: 1. Dr.Fachruzzaman, SE, MDM, AK, CA (Universitas Bengkulu) 2. Dr.Rini Indriani, SE, M.Si, Akt (Universitas Bengkulu)
Sekretariat	: Seftya Dwi Shinta, SE., M.Ak
Operator Web	: Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak
Alamat Redaksi	: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Jl.A.yani No 1 Kota Bengkulu. Tlp: (0736) 21536. Email: jazunihaz@gmail.com Web : https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz

MITRA BESTARI

No	Nama Reviewer	Perguruan Tinggi
1	Dr. DWI ERMAYANTI SUSILO, SE.MM	STIE PGRI Dewantara Jombang
2	Dr. Alistraja Dison Silalahi, SE., M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
3	Bambang Arianto, SE., M.Ak	STISIP Banten Raya
4	Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM., CADE., CTA.	Universitas Jember
5	Dwi Prastiyo Hadi. SE.M.Si	Universitas PGRI Semarang
6	Debby Chyntia Ovami, S. Pd , M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
7	Decky Hendarsyah, S.Kom., M.Cs.	STIE Syariah Bengkulu

TIM EDITOR

No	Nama Editor	Perguruan Tinggi
1	Helmi Herawati, S.E., M.Si	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
2	Iwin Arnova, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
3	Helvoni Mahrina, S.E., M.M	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
4	Nina Yulianasari, S.E., M.Sc	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
5	Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

DAFTAR ISI

<p>PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING TERHADAP MINAT BELAJAR MAHASISWA AKUNTANSI</p> <p>Ayu Pandansari¹, Mochammad Ilyas Junjuna², Binti Shofiatul Jannah³, Nur Ravita Hanun⁴, Ajeng Tita Nawangsari⁵, Aprilya Dwi Yandari⁶ <i>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2,3,5}, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo⁴, Universitas Wiraraja Madura⁶</i> mij@uinsby.ac.id, apriilya@wirajaja.ac.id</p>	121 - 128
<p>ANALISIS SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) TERHADAP KETERSEDIAAN BAHAN BAKU PT HJ BUSANA INDAH</p> <p>Viki Lestari <i>Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> vikilestari53@gmail.com</p>	129 - 140
<p>PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN PADA SPARE PART ALAT BERAT DI KOTA BENGKULU</p> <p>Dwi Sinta Cahyani¹, Helmi Herawati², Iwin Arnova³ <i>Fakultas Ekonomi Universitas Prof Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> Dwi.sinta01.ds@gmail.com¹, herawati77@gmail.com², iwinarnova89@gmail.com³</p>	141 - 151
<p>PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, KEWAJIBAN MORAL DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAKBADAN DENGAN DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI</p> <p>Yosi Safri Yetmi <i>Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang</i> ysyetmi@unis.ac.id</p>	152 - 164
<p>FINANCIAL KNOWLEDGE DAN GAYA HIDUP DALAM MENGUKUR FINANCIAL BEHAVIOUR GENERASI Z DARI PERSPEKTIF PENGGUNAAN MOBILE PAYMENT</p> <p>Gusi Putu estara Permana¹, Ni Putu Mita Adnyani², Kadek Wulandari aksmi P³ <i>Universitas Pendidikan Nasional, Bali</i> lestarapermana@undiknas.ac.id¹, mitaadnyani81@gmail.com², wulandarilaksmi@undiknas.ac.id³</p>	165 - 178
<p>PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN: PERAN KUNCI PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)</p> <p>Pirlo Putri Amiefa Noer¹, Aristanti Widyaningsih² <i>Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat</i> pirlo.putri@upi.edu¹, aristanti.widyaningsih@upi.edu²</p>	179 - 186

<p>ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD PROVINSI YANG ADA DI PULAU SUMATERA</p> <p>Winy Lian Seventeen¹⁾, Bunga Purnama Sari²⁾ <i>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> wiseventeen@gmail.com¹⁾, bungapurnamasari1820@gmail.com²⁾</p>	187 - 193
<p>EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DANA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) AFIRMASI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI KABUPATEN SELUMA</p> <p>Redho pebriansyah¹⁾, Fathul Hilal Perdana Kusuma²⁾, Helvoni Mahrina³⁾ <i>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Prof.Dr. Hazairin, SH Bengkulu</i> Redhofebriansyah@gmail.com¹⁾, fathul.hilal.5758@gmail.com²⁾, vonnbybkl@gmail.com³⁾</p>	194 - 203
<p>STUDI ITERATUR : FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT DIPENGARUHI OLEH AUDIT OPERASIONAL</p> <p>Mutiara Octaviani Yudiah¹⁾, Prilcilia Kartika²⁾, Carmel Meiden³⁾ <i>Institute Kwik Kian Gie, Jakarta</i> 0382202004@student.kwikkiangie.ac.id¹⁾, 0382202007@student.kwikkiangie.ac.id²⁾, carmel.meiden@kwikkiangie.ac.id³⁾</p>	204 - 210
<p>ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI GENTENG KOTA SUKABUMI</p> <p>Andari Wiji Utami¹⁾, Iqbal Noor²⁾ <i>Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> andariwiji123@gmail.com¹⁾, iqnoor@ummi.ac.id²⁾</p>	211 - 221
<p>DAMPAK PENTUPLE BOTTOM INE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)</p> <p>Elisa Ayu Febryanti¹⁾, Chyntia Dewi N.O²⁾, Qhuluqi Alya³⁾, Maria Yovita R. Pandin⁴⁾ <i>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</i> 1222000080@surel.untag-sby.ac.id¹⁾, 1222000090@surel.untag-sby.ac.id²⁾, 1222000092@surel.untag-sby.ac.id³⁾, yovita_87@untag-sby.ac.id⁴⁾</p>	222 - 232
<p>PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA</p> <p>Hanna Andrea Era Prabandari¹⁾, Jaka Maulana²⁾ dan Cahyat Rohyana³⁾ <i>Universitas ogistik dan Bisnis Internasional Bandung</i> hanaandrea09@gmail.com¹⁾, maulanajaka06@gmail.com²⁾, cahyatrohyana@poltekpos.ac.id³⁾</p>	233 - 244
<p>ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG (Studi Kasus Pada Toko Ponsel Twentyone Kota Sukabumi)</p> <p>Adinda Yasmine Putri Krisnadi¹⁾, Gatot Wahyu Nugroho²⁾ Idang Nurodin³⁾ <i>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi</i> Adindayasmineputri1930611021@gmail.com¹⁾, gatotwahyunu2@gmail.com²⁾, idangnurodin@ummi.ac.id³⁾</p>	245 - 254

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI GENTENG KOTA SUKABUMI

Andari Wiji Utami¹⁾, Iqbal Noor²⁾

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
andariwiji123@gmail.com¹⁾, iqnoor@ummi.ac.id²⁾

ABSTRACT

The School Operational Assistance Fund (BOS) is a program from the government to support the 9-year compulsory education program. The existence of BOS funds can lighten the cost burden for people who are classified as poor, in addition to meeting the needs in organizing learning for students and school operational needs. In this study using qualitative methods with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the management of BOS funds in SD Negeri Genteng is quite good even though there are still technical problems and the management refers to the technical guidelines set by the government. The management of BOS funds begins with planning or School Activity Plans and Budgets (RKAS), using budgets to support student needs and school operational expenditures, and preparing accountability reports that will be reported to relevant parties. If the school has finished making an accountability report, the treasurer will archive the BOS funds documents to anticipate losses. Schools must implement accountability in reporting BOS funds in order to increase the sense of trust the government and the community have in schools. With the existence of BOS funds, the school was greatly assisted, one of which was having adequate facilities and infrastructure which became a benchmark for the quality of education that had to be improved.

Keywords: *accountability, School Operational Assistance Funds (Bos) and Quality Education.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk biaya non personalia bagi embaga sekolah dasar dan menengah sebagai unit pelaksanaan program wajib belajar, selain itu juga dapat digunakan untuk mendanai beberapa kebutuhan sekolah sesuai dengan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 telah dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Berdasarkan undang-undang tersebut, pihak sekolah sebagai embaga pendidikan harus memberikan pelayanan dan informasi kepada semua pihak yang terkait agar mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas merupakan sifat pertanggungjawaban publik yang artinya sistem penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan terhadap pihak pemerintah dan masyarakat (Kasus et al., 2019). Penerapan prinsip tersebut akan membawakan efek bagi publik dan pihak terkait, sehingga pihak sekolah bagian dari penyelenggara pendidikan yang profesional dalam pengelolaan dana keuangan pemerintahan.

Sarana dan prasarana sekolah menjadi tolok ukur mutu sekolah yang harus ditingkatkan secara terus menerus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal khususnya di SD Negeri genteng. Karena SD Negeri Genteng mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan termasuk salah satu kebijakan keuangan pemerintah dibidang pendidikan. sekolah yang menerapkan prinsip akuntabel secara optimal dalam pengelolaan keuangan dapat dipercaya oleh masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Dengan adanya sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dapat meningkatkan mutu pendidikan pada bagian integral serta meningkatkan kualitas sumber

daya manusia secara menyeluruh. Maka diperlukannya paradigma baru manajemen pendidikan untuk kepentingan tersebut, seperti mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam mengelola pendidikan sesuai dengan ketentuan reformasi dalam era global. Selain itu salah satu faktor yang dapat menentukan peningkatan mutu pendidikan dalam sekolah yaitu guru (Noor, 2017).

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Genteng Kota Sukabumi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Genteng Kota Sukabumi

2. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditentukan melalui pengembangan sumber daya dan potensi sistem pendidikan secara efektif dan efisien, khususnya di bidang keuangan pendidikan

Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan keuangan berarti penggunaan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban ini dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah (Wahyudin, 2021:30). Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan, kinerja serta tindakan dalam penyelenggara organisasi kepada pihak yang berhak atau berkepentingan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah terdiri dari keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan sekolah yang harus dikomunikasikan kepada publik (Tuala, 2018:138). Berdasarkan pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kinerja seseorang dalam pelaksanaan mengelola aporan keuangan harus dilakukan dengan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pihak masyarakat atau publik terhadap lembaga pendidikan. Ada 3 pilar yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu :

1. Lembaga pendidikan terbuka untuk menerima kontribusi dan melibatkan berbagai komponen dalam pengelolaan keuangan sekolah.
2. Adanya standar kinerja di setiap lembaga pendidikan yang memiliki standar kinerja yang dapat diukur terhadap pemenuhan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Adanya partisipasi bersama untuk menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya pelayanan masyarakat dengan prosedur yang sederhana, biaya yang terjangkau dan pelayanan yang cepat.

Dana Bantuan Operasional (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya penyediaan pembiayaan non operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai penyelenggara wajib belajar 9 tahun dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, disebutkan dengan jelas bahwa tujuan BOS adalah membebaskan biaya untuk semua sekolah dasar dan menengah, pemerintah membebaskan biaya untuk seluruh peserta didik, dan meringankan beban biaya operasional di sekolah swasta (Sri Rahayu, 2020:14). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 2022).

Dalam pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Satuan pendidikan penerima dana BOS harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah, antara lain : memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang terdata pada Dapodik, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat pada tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik, memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan, tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama, tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Mutu Pendidikan

Secara umum mutu mengandung arti tingkat keunggulan suatu usaha dalam hal barang atau jasa tetapi dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan menyangkut mutu seperti bahan ajar, mutu tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sekolah serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif (Tuala, 2018:62). Mutu pendidikan dalam perspektif manajemen pendidikan dapat diartikan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan dalam instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah (Wahyudin, 2021:133). Dalam penjelasan di atas maka peneliti dapat menjelaskan bahwa mutu pendidikan merupakan suatu kualitas yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan mengacu pada hasil akhir dari pendidikan tersebut misalnya proses belajar mengajar yang memiliki efektivitas tinggi, sekolah memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, lingkungan sekolah yang aman dan tertib dan sebagainya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah penelitian yang melakukan sebuah analisis dan interpretasi teks serta hasil wawancara dengan tujuan untuk memperoleh makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar mengetahui kuantabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada laporan keuangan yang telah dijalankan. Teknik pengumpulan data adalah tindakan yang paling penting dalam penelitian, karena memiliki tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, maka tidak akan memperoleh data yang mencukupi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022). Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai sumber atau berbagai cara, apabila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data ada dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang dilakukan dengan cara memberikan data terhadap peneliti secara langsung, sedangkan sekunder merupakan sumber data yang dilakukan dengan cara tidak langsung memberikan data terhadap peneliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, operator BOS, bendahara 1 dan bendahara 2. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui hal yang mendetail mengenai profil sekolah, struktur organisasi sekolah dan cara pengelolaan dana BOS hingga mutu pendidikan yang ada di SD Negeri Genteng. Dengan melakukan dokumentasi dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam laporan dana BOS seperti bukti transaksi pembelian dan pengeluaran biaya operasional sekolah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan sekolah harus didasari pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

SD Negeri Genteng merupakan instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pendidikan, serta melayani masyarakat untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. SD Negeri Genteng termasuk salah satu sekolah dasar yang ada di kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan masa pendidikan sekolahnya selama 6 tahun yang dipimpin oleh kepala sekolah bernama ibu Endah Suswanti Syafei, S.Pd. SD Negeri Genteng berada di bawah instansi pemerintah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang harus mengikuti semua peraturan yang menyangkut pendidikannya maupun kepegawaian sekolah. SD Negeri Genteng ini memiliki 18 rombel dari 590 siswa, serta memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 32 orang, memberikan pelayanan yang sangat baik berupa pendidikan. Hal ini bertujuan agar sekolah tersebut lebih diminati oleh masyarakat karena kelebihanannya untuk meningkatkan kualitas sekolah. Misalnya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dari sekolah lain serta memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh transportasi umum akan lebih diminati daripada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana kurang lengkap serta lokasinya yang kurang strategis. Mengenai kondisi sarana dan prasarana di SD Negeri Genteng yang mendapatkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Sukabumi, dapat dilihat dari tabel 1:

Tabel 1 Data Ruang Pendidikan dan Kondisinya Tahun 2022

Nama Ruang	Rincian Jumlah Ruang	Kondisi Ruang			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak	
Ruang Kelas	15	✓			3 kelas rusak ringan
Ruang Guru	1	✓			
Toilet Siswa	6	✓		✓	4 (baik) 2 (rusak)
Toilet Guru	2	✓			1 (proses perbaikan)
Ruang Kepala Sekolah	1	✓			
Perpustakaan	1	✓			
Mushola	1	✓			
Ruang UKS	1	✓			Kurang luas
Lapangan	2	✓			
Gudang	1	✓			

(Sumber data dari Tata Usaha SD Negeri Genteng per 2022-2023)

Dilihat dari tabel tersebut bahwa kondisi ruang Pendidikan di SD Negeri Genteng, semua kondisinya cukup baik. SD Negeri Genteng ini termasuk sekolah besar karena memiliki 18 rombel dari 590 siswa. Selain itu juga memiliki bangunan serta ruangan yang sangat memadai dimulai dari ruangan kelas, toilet, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, mushola, UKS, lapangan, tetapi SD Negeri Genteng belum memiliki komputer dan ruangan UKS yang sesuai dengan jumlah siswa. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi saat ini sebagian besar masih efektif untuk digunakan hanya ada beberapa saja yang kurang layak, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Sekolah ini memiliki infrastruktur yang sesuai dengan jumlah siswanya karena mendapatkan anggaran dari pemerintah secara rutin per triwulannya yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan ini setiap sekolahnya berbeda-beda karena dilihat dari jumlah siswanya. Pada tahun 2022 penyaluran dana BOS reguler dilakukan dari Rencana Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah dalam 3 tahap yaitu pada tahap I sebesar 30% dibulan Januari, pada tahap II sebesar 40% dibulan April, dan tahap III sebesar 30% dibulan September. Adapun pada tahun 2023 penyaluran dana BOS dilakukan secara 2 tahap yaitu tahap I sebesar 50% dibulan Januari dan tahap II sebesar 50% dibulan Juli.

Berdasarkan tabel tersebut pemerintah mengalokasikan dana kepada pihak sekolah berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di aplikasi DAPODIK, selain itu juga anggaran yang diterima di setiap sekolah itu jumlahnya berbeda. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka anggaran per siswa itu sebesar Rp. 900.000,- pertahun, jadi SD Negeri Genteng ini mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 531.000.000,- dalam setahun

Tabel 3 Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Jenjang Sekolah	Sasaran dan Unit Cost		
	Siswa	Rp/Siswa	Total Dana
SD Negeri Genteng	590	900.000/1 Tahun	558.000.000,-

(Sumber data dari Tata Usaha SD Negeri Genteng per 2022-2023)

Dalam pengelolaan penyaluran dana BOS Perencanaan dana BOS Sebelum pemerintah menyalurkan anggaran kepada pihak sekolah maka akan melihat hasil rapor mutu pendidikan yang dihasilkan dari kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang dilaksanakan oleh siswa kelas ima. Hal pertama sebelum menyalurkan dana BOS pihak sekolah harus membuat sebuah perencanaan anggaran. Penyusunan perencanaan dana BOS di SD Negeri Genteng Kota Sukabumi dimulai dari penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Dalam satu tahun anggaran pihak sekolah membuat perencanaan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sebelum dibuat RKAS pihak sekolah mengadakan rapat terlebih dahulu dengan pihak guru dan komite. Kepala sekolah selaku penanggung jawab utama beserta tim pengelola dana BOS membuat RKAS dari hasil rapat tersebut. Dalam kegiatan ini wakasek sarana dan prasarana merencanakan satu tahun anggaran untuk apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan peserta didik pada pembelajaran dan kebutuhan sekolah dalam pengadministrasian. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah berguna untuk menunjang kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kenyamanan bagi peserta didik. Wakasek kurikulum juga ikut serta dalam membuat perencanaan dana BOS, untuk memenuhi dalam kegiatan pembelajaran. Diantaranya buku pegangan siswa, buku induk siswa, buku absensi, buku bacaan yang berada di perpustakaan, buku pembelajaran serta mengenai pendaftaran peserta didik baru dan kelulusan. Perencanaan dalam pendaftaran peserta didik baru dan kelulusan ini membutuhkan anggaran dimulai dari administrasi pendaftaran konsumsi panitia, dengan begitu anggaran yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Semua perencanaan yang dibuat wakasek kurikulum ini bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana para guru juga mengajukan perencanaan untuk kebutuhan kelas. Diantaranya media dalam mendukung pembelajaran papan tulis, gambar pembelajaran, diagram, bola kecil, peta dan globe. Dengan adanya media pembelajaran peserta didik akan merasa tertarik dan mudah paham dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Tabel 4 Perencanaan Anggaran Dana BOS

Kode Rekening	Komponen Penggunaan Dana Bos	Jumlah
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 0
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 450.750.000,-
5.2.3	Belanja Modal	Rp. 80.250.000,-
TOTAL		Rp. 531.000.000,-

(Sumber data dari Perencanaan Anggaran Dana BOS 2022)

Setiap sekolah wajib membuat perencanaan anggaran sebagaimana telah diamanatkan dalam petunjuk teknis dana BOS Pasal 1 ayat 21 bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1

(satu) tahun anggaran yang dikelola oleh pihak satuan pendidikan. Pada perencanaan dana BOS kepala sekolah beserta tim pengelola BOS melakukan analisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang akan dikeluarkan dalam satu tahun anggaran.. Berdasarkan pemaparan data di atas maka peneliti menggunakan metode wawancara mengenai kegiatan perencanaan dana BOS di SD Negeri Genteng. Dalam proses penyusunannya keikutsertaan kepala sekolah dengan tim pengelola dana BOS dapat mencerminkan transparansi pengelolaan dana sesuai dengan teori prinsip manajemen keuangan sekolah. Pembuatan RKAS ini dilakukan sebelum pihak sekolah menerima dana BOS dari pemerintah, biasanya dilakukan pada akhir tahun. Berikutnya pihak sekolah harus melakukan pemutakhiran data peserta didik pada aplikasi DAPODIK alu mengirimkan jumlah peserta didik tersebut kepada pihak dinas pendidikan dan kebudayaan. Untuk perhitungan penyaluran dana BOS dilihat dari jumlah peserta didik alu dikalikan dengan Rp. 900.000,- per tahunnya. Setiap sekolah memiliki jumlah peserta didik yang berbeda-beda, maka dari itu anggaran yang diterimanya pun tentu berbeda. Sekolah harus mengatur keuangan dana BOS dengan sebaik mungkin agar dapat mencukupi semua kebutuhan peserta didik dan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pada pelaksanaan realisasinya terkadang ada beberapa kendala yang terjadi, seperti penginputan data di aplikasi ARKAS dengan harga di pasaran tidak sesuai. Untuk mengatasi hal ini pihak bendahara BOS harus pintar dalam mengelola pembelanjaan, contohnya ketika harga kertas HVS pada aplikasi ARKAS seharga Rp. 50.000,- sedangkan di pasaran seharga RP. 60.000,- maka ketika penginputan dalam aplikasi dan transfer kepada pihak toko selalu dilebihkan hal ini dilakukan untuk mengimbangi harga pada aplikasi dengan harga di pasaran. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah pusat belum melakukan update harga pada aplikasi tersebut. Berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pihak sekolah akan menjadi solusi. Walaupun ada beberapa poin yang tidak terealisasi dengan baik sesuai aplikasi ARKAS akan tetapi SD Negeri Genteng dapat mengalokasikan dana BOS sesuai dengan baik, sehingga dapat memenuhi dalam menunjang kebutuhan peserta didik dan kebutuhan operasional sekolah. Adanya solusi di atas maka pihak sekolah pada tahun selanjutnya akan menerima anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

a. Penggunaan dana BOS

Dana BOS ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan menunjang kebutuhan siswa, sehingga semua masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas. Penggunaan dana BOS di SD Negeri Genteng Kota Sukabumi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah agar tercapainya tujuan dalam aporan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS di SD Negeri Genteng harus mendapatkan kesepakatan dari pihak penanggung jawab yaitu kepala sekolah. Prosedur untuk mencairkan dana BOS melalui *cut off* DAPODIK sekolah, dan akan terlihat jumlah peserta didik di SD Negeri Genteng oleh pihak dinas dan kemendikbud. Maka dari itu dapat direalisasikan penyaluran dana BOS SD Negeri Genteng Kota Sukabumi pada tahun 2022 dari triwulan 1 sampai triwulan 4 sebagai berikut :

Tabel 5 Realisasi Penggunaan Dana BOS SD Negeri genteng

No	Triwulan 1	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Perpustakaan	Rp. 3.400.000,-	Penyediaan buku yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan dan menunjang operasional ayanan perpustakaan.

2.	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp. 4.620.000,-	Penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran dan penyelenggaraan ekstrakurikuler sekolah.
3.	Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	Rp. 4.907.000,-	Biaya ujian sekolah serta kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di sekolah.
4.	Administrasi Kegiatan Sekolah	Rp. 36.978.000,-	Pembiayaan dalam pengelolaan dan operasional rutin sekolah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan.
5.	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah	Rp. 9.375.000,-	Pembiayaan kegiatan pengembangan metode pembelajaran dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
6.	Langganan daya dan jasa	Rp. 4.405.630,-	Pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran anggran daya dan jasa yang relevan.
7.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp. 40.499.000,-	Pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana.
8.	Pembayaran Honor	Rp. 22.200.000,-	Pembayaran yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Total		Rp. 126.384.630,-	
No	Triwulan 2	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Rp. 780.000,-	Pembiayaan pelayanan penerimaan peserta didik baru serta kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
2.	Pengembangan Perpustakaan	Rp. 2.000.000,-	Penyediaan buku yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan dan menunjang operasional ayanan perpustakaan.
3.	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp. 2.000.000,-	Penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran dan penyelenggaraan ekstrakurikuler sekolah.
4.	Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	Rp. 11.056.000,-	Biaya ujian sekolah serta kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di sekolah.
5.	Administrasi Kegiatan Sekolah	Rp. 48.892.000,-	Pembiayaan dalam pengelolaan dan operasional rutin sekolah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan.
6.	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah	Rp. 14.400.000,-	Pembiayaan kegiatan pengembangan metode pembelajaran dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

7.	Langganan daya dan jasa	Rp. 4.210.869,-	Pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran anggran daya dan jasa yang relevan.
8.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp. 49.250.000,-	Pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana.
9.	Pembayaran Honor	Rp. 16.800.000,-	Pembayaran yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Total		Rp. 149.388.869,-	
No	Triwulan 3	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Perpustakaan	Rp. 2.000.000,-	Penyediaan buku yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan dan menunjang operasional ayanan perpustakaan.
2.	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp. 2.740.000,-	Penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran dan penyelenggaraan ekstrakurikuler sekolah.
3.	Administrasi Kegiatan Sekolah	Rp. 34.730.000,-	Pembiayaan dalam pengelolaan dan operasional rutin sekolah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan.
4.	Langganan daya dan jasa	Rp. 3.035.295,-	Pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran anggran daya dan jasa yang relevan.
5.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp. 18.122.000,-	Pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana.
6.	Pembelian/Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp. 18.000.000,-	Pembiayaan komputer, printer, aptop, proyektor serta harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
7.	Pembayaran Honor	Rp. 16.400.000,-	Pembayaran yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Total		Rp. 95.027.295,-	
No	Triwulan 4	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Perpustakaan	Rp. 2.500.000,-	Penyediaan buku yang disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan dan menunjang operasional ayanan perpustakaan.
2.	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp. 16.710.000,-	Penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran dan penyelenggaraan ekstrakurikuler sekolah.
3.	Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	Rp. 15.115.000,-	Biaya ujian sekolah serta kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di sekolah.

4.	Administrasi Kegiatan Sekolah	Rp. 45.430.000,-	Pembiayaan dalam pengelolaan dan operasional rutin sekolah yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan.
5.	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah	Rp. 6.197.000,-	Pembiayaan kegiatan pengembangan metode pembelajaran dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
6.	Langganan daya dan jasa	Rp. 3.444.225,-	Pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran anggranan daya dan jasa yang relevan.
7.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Rp. 30.523.000,-	Pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana.
8.	Pembelian/Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp. 13.000.000,-	Pembiayaan komputer, printer, aptop, proyektor serta harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
9.	Pembayaran Honor	Rp. 26.300.000,-	Pembayaran yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Total		Rp. 159.219.225,-	

(Sumber data dari Tata Usaha SD Negeri Genteng per 2022)

Pembukuan ini dilakukan oleh pihak bendahara dan akan diinput secara online oleh operator BOS melalui aplikasi ARKAS. Jika dalam realisasinya tersisa anggaran maka operator BOS harus mengirimkan aporan realisasi dan sisa anggaran tersebut kepada dinas pendidikan dan kebudayaan. Kepala sekolah selalu mengawasi dalam pengelolaan penyaluran dana BOS mulai dari pencairan dana hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Dalam penyaluran penggunaan dana BOS kota Sukabumi sudah menerapkan sistem tanpa tunai yang artinya anggaran dana BOS tidak boleh dipegang secara tunai. Jika pihak sekolah ingin melakukan pembelanjaan harus melalui transfer kepada pihak toko menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu aplikasi SIBOS. Jika terjadi kendala error dalam aplikasi tersebut maka pihak sekolah membuat *Standing Instruction* (SI) dan merekap apa saja yang akan ditransfer alu dikirim kepada pihak bank dan disetujui oleh kepala sekolah dan bendahara.

Berdasarkan pedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah dapat digunakan untuk membiayai beberapa komponen diantaranya seperti pelaksanaan PPDB, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, kegiatan asesmen,

Dengan adanya tujuan penyaluran dana BOS maka pihak sekolah tidak memungut biaya sedikit pun kepada peserta didik. Di SD Negeri Genteng dapat menerapkan petunjuk teknis dana BOS dengan cukup baik. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab. Penggunaan dana BOS yang baik maka dapat memenuhi semua kebutuhan dalam pembelajaran peserta didik dan kebutuhan operasional sekolah. Dari penerapan tersebut maka akan meningkatkan mutu pendidikan salah satunya yaitu memiliki sarana dan prasarana yang aman dan nyaman.

b. Pertanggungjawaban dana BOS

Dalam pengelolaan dana BOS pihak sekolah wajib menyusun aporan yang dilakukan dari awal pencairan hingga penutupan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis dana BOS. Ketika pelaporan dilakukan maka pihak sekolah harus mengumpulkan bukti transaksi jual beli barang dan jasa atas seluruh pemasukan dan pengeluaran pada dana BOS. Dalam aporan pertanggungjawaban dana BOS dapat dilakukan dengan cara tulis tangan atau menggunakan komputer.

Pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah ada dua cara yaitu secara online dan secara manual. Jika aporan secara online dilakukan oleh pihak operator BOS pada aplikasi ARKAS yang akan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak dinas pendidikan dan kebudayaan akan dikirimkan secara langsung kepada pemerintah pusat dan aporan secara online ini dilakukan setiap tiga bulan. Berbeda halnya dengan aporan manual atau aporan pertanggungjawaban atau PJ itu berisikan rekapitulasi anggaran, buku kas umum, buku pembantu bank dan bukti transaksi yang dilakukan pihak sekolah seperti pembelian ATK, konsumsi rapat, penganggaran untuk perlombaan peserta didik, kegiatan pelaksanaan asesmen dan lain sebagainya, pelaporan manual ini dilakukan per triwulan atau empat kali dalam satu tahun.

SD Negeri Genteng melakukan pelaporan pertanggungjawaban mulai dari penerimaan dan pengeluaran dengan online maupun manual, sehingga ada arsip dokumen *hard file* dan *soft file*. Dengan begitu maka pihak sekolah dapat mengurangi risiko kehilangan dokumen pada aporan pertanggungjawaban karena sudah dibuat secara tertulis dan juga terdapat di komputer. Pelaporan dana BOS diperiksa terlebih dahulu oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS, karena peran kepala sekolah sangat penting terhadap keuangan sekolah.

Jika pihak sekolah sudah selesai membuat aporan pertanggungjawaban maka pihak sekolah akan diperiksa oleh pihak inspektorat apakah sudah sesuai dengan RKAS yang dibuat dengan realisasinya. Selain itu juga adanya keterbukaan pihak sekolah kepada para guru, komite sekolah dan para orang tua peserta didik. Hal ini dilakukan sekolah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS perihal pengelolaan dana BOS secara terbuka dan memenuhi keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhannya, karena dalam pelaporan dana BOS harus dilakukan secara akuntabel dan transparansi agar dapat menghasilkan efektif dan efisien dalam penggunaannya. Keterbukaan dalam pelaporan dana BOS yang dilakukan pihak sekolah yaitu dengan cara mengadakan rapat bersama komite kelas untuk mengetahui hasil dari penyaluran dana BOS yang dilakukan di SD Negeri Genteng. Hal ini dilakukan oleh pihak sekolah untuk membangun rasa kepercayaan terhadap orang tua peserta didik dalam meningkatkan mutu sekolah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan di SD Negeri Genteng Kota Sukabumi sudah dapat dikatakan akuntabel walaupun belum sepenuhnya sempurna. Penerapan prinsip akuntabel ini dapat dilihat dari proses pengelolaan dana BOS mulai dari perencanaan anggaran atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), ketika penggunaan anggaran mengacu pada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah, serta tahap akhir yaitu membuat aporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara online pada aplikasi ARKAS dan tertulis pada aporan realisasi dana BOS. Setelah sekolah selesai membuat aporan maka bendahara melakukan pengarsipan dokumen untuk mengantisipasi dari kehilangan.

Alasan sekolah menerapkan prinsip akuntabilitas untuk meningkatkan rasa kepercayaan pihak pemerintah dan masyarakat terhadap sekolah..

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran kepada tim pengelola dana BOS diharapkan dalam pengelolaan keuangan di SD Negeri Genteng dapat mengikuti semua prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tercapainya akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Masyitah. (2019). *Akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Di SDN Nomor 41 Birue Kabupaten Barru)*. 2(41), 185–201.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2, (2008).
- Noor, I. (2017). *Pengaruh Pola Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Cipanengah Cipta Bina Mandiri Kota Sukabumi*. V(2).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. R. I. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Nomor 2 Tahun 2022). *Gastronomía ecuatoriana y turismo ocal.*, 1(69), 5–24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 18 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003).
- Sri Rahayu. (2020). *Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* (Ari Kamayanti (ed.)). Peneleh, Anggota IKAPI.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Sopia Yustiani Suryandari, S.E. (ed.)). ALFABETA.
- Tuala, R. P. (2018). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah* (A. Mujib (ed.)). intang Rasi Aksara Books.
- Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas)* (H. Permana (ed.); Pertama). Budi Utama.